

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG ANGKLUNG OLEH PEMERINTAH DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

Candra Firmanto¹, Tiara Desi², Dini Yuliani³, Regi Refian Garis⁴

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3,4}

E-mail: chandrafirman@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panyingkiran pada masyarakat Kampung Angklung. Kampung Angklung merupakan sebutan untuk salah satu wilayah di Desa Panyingkiran dimana pada wilayah tersebut terdapat tempat memproduksi angklung dan adanya komunitas pengrajin angklung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat Kampung Angklung Oleh Pemerintah Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Panyingkiran memberdayakan masyarakat Kampung Angklung dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, motivasi, dan dukungan, baik dukungan moril maupun materil.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Kampung Angklung, Desa Panyingkiran*

ABSTRACT

This research is motivated by the empowerment carried out by the Panyingkiran Village Government in the Angklung Village community. Kampung Angklung is a term for one of the areas in Panyingkiran Village where there is a place for producing angklung and there is a community of angklung craftsmen. The purpose of this study was to find out how the community empowerment of Angklung Village by the Village Government of Panyingkiran, Ciamis District, Ciamis Regency. The method used in this research is to use a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques using observation techniques, interviews, and documentation. The results of the research show that the Panyingkiran Village Government empowers the people of Angklung Village by providing training, motivation and support, both moral and material support.

Keywords: *Empowerment, Angklung Village, Panyingkiran Village*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Desa merupakan wilayah yang memiliki banyak potensi sumber daya khususnya ekonomi, alam atau lingkungan dan sosial budaya yang dapat dijadikan modal dasar dalam pembangunan serta mensejahterakan masyarakat. Potensi Desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu Desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam suatu Desa dipimpin oleh

seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat melalui pemilu. Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satu tugas Kepala Desa yaitu memberdayakan masyarakat. (Bender, 2016)

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.

Teori tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay (1997) dalam Maani (2011:59) lebih memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan Tindakan-tindakannya. Pemerintah desa memiliki peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam membangun kreativitas masyarakat, salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam membangun kreativitas masyarakat Desa adalah melakukan penanaman modal dalam menumbuhkan kembangkan sumber daya yang telah ada.

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki

kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Panyingkiran merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Ciamis dengan luas wilayah sekitar 229,81 Ha yang terbagi ke dalam 7 RW dan Desa ini terletak sekitar 5 KM dari pusat Pemerintahan Kabupaten Ciamis. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis NO/08/Pem.146.1/DS.SK/1984 tanggal 25 Februari 1984 ditetapkan mengenai batas-batas desa/wilayah yang juga tercantum dalam perdes, yaitu : sebelah utara (Sungai Cipalih, Kelurahan Sindangrasa), sebelah selatan (Sungai Citanduy, Kabupaten Tasikmalaya), sebelah timur (Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis), dan sebelah barat (Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis). Dengan total penduduk sekitar 6.333 Jiwa pada tahun 2021 menurut catatan pemerintah desa setempat, dengan mata pencaharian pokok yang mendominasi sebagai karyawan perusahaan pemerintahan dan pengrajin industri rumah tangga. (Nugroho, 2021)

Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Panyingkiran yaitu dalam bidang ekonomi kreatif berupa kerajinan alat musik tradisional angklung. Bambu sebagai bahan baku pembuatan angklung merupakan tanaman yang tumbuh subur di Indonesia begitupun di wilayah Kabupaten Ciamis sehingga pengrajin tidak akan kesulitan dalam mencari bahan baku untuk pembuatan angklung. Hasil hutan di Desa Panyingkiran khususnya tanaman bambu pertahun menurut data potensi yang ada diperkirakan mencapai 420 batang/Tahun.

Kerajinan alat musik tradisional ini pada awalnya dikembangkan oleh salah satu warga dari Kampung Angklung. Sampai saat ini

kerajinan alat musik angklung sudah menjadi sumber penghasilan sebagian warga di Kampung Angklung. Sebelumnya para pekerja ini sudah diberikan pelatihan tentang cara-cara pembuatan angklung dari mulai pemotongan bahan baku yang berupa bambu sampai dengan proses pemberian gambar yang menjadi salah satu ciri khas tersendiri dari angklung produksi Kampung Angklung. Selain memproduksi angklung, Kampung Angklung juga mempunyai kelompok seni musik angklung yang sudah di sah kan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Panyingkiran Nomor : 253/37/Kpts/Ds/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Pembentukan Kelompok Muda Kreasi Mandiri Kampung Nempel Rw 07 Dusun Linggamanik Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Kelompok ini dibentuk dengan maksud untuk menumbuhkan kreasi dan menumbuhkan minat seni dikalangan pemuda-pemudi yang ada di lingkungan Desa Panyingkiran.

Kampung angklung sendiri pada awalnya bukan bernama kampung angklung tetapi kampung nempel yang berada di Dusun Linggamanik Desa Panyingkiran. Pada tahun 2020 melalui SK Kepala Desa Panyingkiran Nomor 5 Tahun 2020 menetapkan Kampung Nempel sebagai Kampung Angklung yang memiliki kepengurusan secara kelembagaan. Selain itu Kampung Angklung juga akan dijadikan salah satu tempat wisata seni dan budaya di Kabupaten Ciamis dengan konsep pelestarian, pengembangan, edukasi dan seni budaya, dengan demikian penamaan Kampung Angklung juga akan memudahkan wisatawan ketika akan mencari lokasi tujuan.

Amelia (2021) menjelaskan bahwa dalam proses perintisan Desa wisata, masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangannya, karena sumberdaya, kearifan lokal dan budaya yang melekat pada masyarakat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dengan semakin banyaknya orderan angklung maka Sumber Daya Manusia

(SDM) di Desa Panyingkiran masih perlu diadakan pemberdayaan. Tak bisa dipungkiri selain peran Pemerintah Desa setempat, peran SDM juga sangat penting dalam pengimplementasian pemberdayaan masyarakat. Karena pada dasarnya kemampuan SDM akan menentukan keberhasilan realisasi pengembangan. Dengan begitu pemberdayaan masyarakat yang tujuannya untuk memberi daya (kemampuan dan kekuasaan) agar bisa mengelola kampung angklung menjadi Desa wisata.

Berdasarkan pemaparan tersebut perlu kiranya dilakukan penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Kampung Angklung Oleh Pemerintah Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat Kampung Angklung oleh Pemerintah Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pemberdayaan

Zubaedi (2013:43) Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya.

Munawar Noor (2018:88) mengutip pendapat Chamber (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat "*people-centered*", *participatory, empowering, and sustainable*. Istilah pemberdayaan memiliki arti yang lebih luas daripada sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau suatu mekanisme (jaring pengaman) untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut.

Pengertian Masyarakat

Menurut John J. Macionsis (1997) dalam Dedeh Maryani & Ruth (2019:2) masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relative independent dengan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relative sama. Selain itu masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya Bersama.

Ahli dari Indonesia, yaitu Selo Soemardjan (1974) dalam Dedeh Maryani & Ruth (2019:3) memberikan pengertian masyarakat sebagai orang-orang yang hidup Bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Chamber (1995) dalam Munawar Noor (2018:88) Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembanguan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*. Lebih lanjut Chamber menyatakan bahwa ide konsep pengembangan pemberdayaan masyarakat adalah upaya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga untuk mencari alternatif pertumbuhan ekonomi di daerah.

Menurut Vitayala (2000) dalam Zubaedi (2013:61) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tiga-p (*pendampingan, penyuluhan dan pelayanan*). Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, Penyuluhan dapat merespon dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat dan Pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat.

Dedeh Maryani & Ruth (2019:8) pemberdayaan masyarakat ialah proses

pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan adalah meliputi : proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri.

Kampung Angklung

Kampung Angklung merupakan istilah yang terkenal oleh masyarakat yang merujuk pada suatu wilayah perkampungan masyarakat di Kampung Nempel, Dusun Linggamanik, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Penamaan Kampung Nempel sendiri menurut warga masyarakat Kampung Angklung dilatar belakangi oleh wilayah kampung yang berada di sisi sebuah gawir (jurang/tebing) atau menempel pada gawir. Seperti yang dikatakan oleh masyarakat setempat dahulu kala ada sebuah rumah di tempat itu yang terletak di tepi tebing atau jurang, namun saking kuatnya sehingga rumah tersebut nempel terus ke tebing yang menjadi sandarannya. Sampai saat ini, semakin banyak rumah yang dibangun menempel di tebing-tebing itu. Jalan perkampungan di sana turun naik mengikuti kontur tanah wilayah perbukitan. (Nopianti & Budiman, 2021)

Dengan banyaknya warga masyarakat kampung nempel yang menjadi buruh pembuat angklung sehingga salah satu warga menggagas kampung nempel sebagai Kampung Angklung dan sudah di sah kan melalui SK Bupati Ciamis Tahun 2020 No. 451/kpts.378-Bidbud. Penggunaan nama Kampung Angklung sendiri terinspirasi dari perkampungan - perkampungan industri rumah tangga seperti pusat bordir di Tasikmalaya dan pusat tikar di Purbaratu. Selain itu penamaan Kampung Angklung juga diharapkan mampu memudahkan wisatawan dan pembeli angklung ketika akan mencari lokasi tujuan. Selain itu penamaan Kampung Angklung juga bertujuan untuk mempromosikan keberadaan

desa sebagai icon desa yang mampu menghasilkan ciri khas desa nya.

Pengertian Pemerintah Desa

Ridwan HR (2002) dalam Dedeh Maryani & Ruth (2019:17) menyatakan bahwa pemerintah adalah organisasi organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di suatu negara dan bertugas untuk mengelola system pemerintahan dalam mencapai tujuan negara.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja pemerintah Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, urusan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan. (Raharjo, 2021:7)

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui jawaban dari wawancara dengan informan. Data sekunder diperoleh dari

dokumentasi, peraturan-peraturan, data potensi desa dari Pemerintah Desa Panyingkiran, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan catatan lain yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisi data dalam pelaksanaannya menggunakan teknik wawancara yang direkam dengan media recorder yang kemudian rekaman tersebut akan dituangkan secara tertulis (ditranskripsikan) oleh peneliti supaya bisa menjadi data penguat dalam hasil penelitian yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Kampung Angklung oleh Pemerintah Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis penulis telah melakukan kegiatan observasi dan mewawancarai sebanyak enam informan dengan memperhatikan berbagai dimensi dan indikator sesuai dengan fokus penelitian mengenai pemberdayaan dengan menggunakan teori ACTORS yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay (1997) dalam (Utaminingsih, 2020:27) yaitu sebagai berikut :

Authority (Kewenangan)

Authority atau wewenang dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panyingkiran yaitu dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengubah pendirian atau semangat dalam bekerja (etos kerja). Berdasarkan etos kerjanya, maka mampu menciptakan perubahan dan dinamika masyarakat sehingga menghasilkan produk dari keinginan mereka untuk menuju peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Ridwan. HR (2014) dalam Fierany Pantow, Buddy J Tampi, (2019) bahwa kewenangan, wewenang adalah salah satu prinsip utama yang dijadikan

sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Adapun dalam dimensi kewenangan terdapat 2 indikator diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah memberikan kepercayaan wewenang kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat.
2. Masyarakat diberikan kewenangan untuk menentukan bidang keahlian yang mereka inginkan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam dimensi *authority* (kewenangan) yang terdiri dari dua indikator dapat diketahui bahwa setiap indikator sudah berjalan optimal. Hal tersebut terlihat dengan sudah berjalannya kewenangan yang diberikan dengan tidak membatasi apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan masyarakat bebas memilih bidang keahliannya sendiri.

***Confidence and Competence* (rasa percaya diri dan kemampuan)**

Menurut Sarah Cook dan Steve Macaulay (1997) dalam Utaminingsih (2020:27) *Confidence and Competence* atau rasa percaya diri dan kemampuan diri adalah upaya menumbuhkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan yang dimiliki sehingga mampu untuk mengubah keadaan menjadi lebih bersemangat dalam meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga. Pada strategi ini pemerintah Desa berupaya menimbulkan dan menanamkan rasa percaya diri dan kemampuan masyarakat dengan cara melihat potensi yang dimiliki untuk dapat melakukan perubahan. Adapun dalam dimensi *Confidence and Competence* atau rasa percaya diri dan kemampuan diri terdapat dua indikator diantaranya sebagai berikut :

1. Menimbulkan rasa percaya diri kepada masyarakat dengan cara melihat potensi mereka untuk dapat melakukan perubahan.

2. Menyadarkan masyarakat akan kemampuan dan potensi yang dimiliki dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan seni.

Berdasarkan hasil penelitian dalam dimensi *Confidence and Competence* atau rasa percaya diri dan kemampuan diri yang terdiri dari dua indikator dapat diketahui bahwa setiap indikator sudah berjalan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Kampung Angklung yang menjadi pengrajin atau bahkan sudah membuka produksi angklungnya sendiri, selain itu masyarakat Kampung Angklung juga sering diikutsertakan dalam kegiatan pameran dan pentas seni, kegiatan pentas seni yang pernah diikuti oleh Kelompok Muda Kreasi Mandiri diantaranya dalam acara Lunching website visitciamis.com & [visit Ciamis Magazine](http://visitCiamisMagazine), Hari Krida Pertanian ke-49, Rakerdis LSM GMBI 2022, Revitalisasi dan Sosialisasi Angklung Ngurulung di Situ Cibeureum, Pembukaan Porseni MTsN 1 Ciamis, Hari Pers Nasional, dan Upacara Adat Misalin 2022.

***Trust* (keyakinan)**

Menurut Sarah Cook dan Steve Macaulay (1997) dalam Utaminingsih (2020:28) *trust* atau keyakinan artinya berusaha menimbulkan keyakinan diri yang tinggi sehingga yakin dan percaya bahwa mereka mempunyai potensi untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik lagi, dan merasa yakin dan mampu untuk mengubahnya. Untuk dapat berdaya masyarakat harus memiliki keyakinan bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan. Keyakinan ini bisa diberikan pada saat melaksanakan pembinaan dan pada saat melaksanakan rapat atau musyawarah bersama masyarakat. Adapun dalam dimensi *trust* atau keyakinan terdapat dua indikator diantara sebagai berikut:

1. Masyarakat mempunyai keyakinan bahwa terdapat perubahan positif yang mereka rasakan setelah mereka memperoleh pemberdayaan.

2. Yakin akan ciri khas produk yang dihasilkan dan berbeda dari yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian dalam dimensi *trust* atau keyakinan yang terdiri dari dua indikator dapat diketahui bahwa setiap indikator sudah berjalan optimal. Hal ini dibuktikan dengan pendapat masyarakat bahwa mereka merasakan sendiri hasil dari pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti, dan produk angklung yang dihasilkan mempunyai ciri khas nya sendiri yaitu dengan memberikan gambar batik pada angklung.

Oppurtinities (kesempatan)

Kesempatan yang dimaksud oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay (1997) dalam Utaminingsih (2020:28) adalah berusaha lebih keras untuk memberikan kesempatan pada masyarakat dalam memilih apa yang menjadi keinginannya masing-masing, sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri yang disebut “yang dititipkan oleh Allah SWT pada diri manusia”. Adapun dalam dimensi *oppurtinities* atau kesempatan terdapat dua indikator diantaranya sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat.
2. Memberikan ruang kepada masyarakat agar mereka memiliki kesempatan untuk menampilkan hasil karya mereka kepada publik.

Berdasarkan hasil penelitian dalam dimensi *oppurtinities* atau kesempatan yang terdiri dari dua indikator dapat diketahui bahwa setiap indikator sudah berjalan optimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya karyawan yang bekerja di saung angklung rata-rata berdomisili di Desa Panyingkiran, namun tidak sedikit juga ahli yang berdomisili di luar Desa Panyingkiran dan beberapa kali masyarakat Kampung Angklung ikut menampilkan hasil karya mereka dengan mengikuti acara-acara pameran dan pentas seni yang diadakan di Kabupaten Ciamis maupun di luar Kabupaten Ciamis.

Responsibilities (tanggung jawab)

Menurut Sarah Cook dan Steve Macaulay (1997) dalam Utaminingsih (2020:28) meyakini bahwa “proses pemberdayaan harus melalui pengelolaan sehingga butuh pemenuhan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan , yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mengubah kondisi kehidupannya menjadi lebih baik”. Tanggungjawab disini maksudnya perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab pemerintah pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan. Pemberdayaan yang dilakukan masyarakat tentunya untuk menjadikan masyarakat tersebut berubah ke taraf hidup yang lebih baik. Adapun dalam dimensi *responsibilities* atau tanggung jawab terdapat dua indikator diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya rasa tanggung jawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan.
2. Pengelola memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dalam dimensi *responsibilities* atau tanggung jawab yang terdiri dari dua indikator dapat diketahui bahwa setiap indikator sudah berjalan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya lahan yang di khususkan oleh pengelola untuk menyimpan bahan baku, hasil produksi dan limbah sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar, hanya saja tempat produksi angklung masih dilakukan ditempat tinggal pengelola dikarenakan belum adanya anggaran yang didapat untuk pembangunan tempat produksi.

Support (dukungan)

Dukungan menurut Sarah Cook dan Steve Macaulay (1997) dalam Utaminingsih (2020:28) adalah upaya menjadi lebih baik memerlukan adanya dukungan dari berbagai pihak. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi politis, ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai

stakeholders (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara silmultan tanpa disominasi oleh salah satu pihak atau faktor tertentu saja. Adapun dalam dimensi *support* atau dukungan terdapat dua indikator diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari berbagai pihak.
2. Memberikan ruang kepada masyarakat agar mereka dapat mengaplikasikan pelatihan yang selama ini mereka dapat dalam bentuk karya.

Berdasarkan hasil penelitian dalam dimensi *support* atau dukungan yang terdiri dari dua indikator dapat diketahui bahwa salah satu indikator belum optimal, hal ini terbukti dengan kurangnya anggaran yang ada di Desa Panyingkiran untuk pengembangan dan pembangunan di Kampung Angklung sehingga sarana prasarana yang ada disana belum memadai seperti tempat produksi yang masih dilakukan ditempat tinggal pengelola dan lahan parkir yang kecil.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Kampung Angklung Oleh Pemerintah Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik dan berjalan efektif. Informasi yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dengan mewawancarai enam orang informan yaitu Sekretaris Desa Panyingkiran, Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, Ketua Adat Kampung Angklung, Ketua Kelompok Muda Kreasi Mandiri, dan masyarakat Kampung Angklung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat enam dimensi yang dijadikan ukuran dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Angklung oleh Pemerintah Desa Panyingkiran. Dari enam dimensi tersebut, terdapat satu

indikator yang tidak optimal, yaitu indikator yang terdapat dalam dimensi *support* atau dukungan. Hal ini terlihat dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Panyingkiran sehingga sarana prasarana yang ada disana belum memadai dan pengembangan potensi serta pembangunan yang ada di Kampung Angklung terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bender, D. (2016). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1), 45–54.
- Dedeh Maryani & Ruth (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : CV BUDI UTAMA.
- Fierany Pantow, Buddy J Tampi, R. mambo. (2019). *Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kanonang V Kecamatan Kawangkoang Barat Kabupaten Minahasa*. Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi
- Maani, K. D. (2011). *Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Demokrasi, X(1), 53–66.
- Munawar Noor, 2018. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat*. Dedikasi: Journal of Community Engagment, I(2), 87–99.
- Nugroho, Y. A. (2021). *Profil Desa Panyingkiran*. In *Website Kalurahan Srigading. Desa Panyingkiran*.
- Raharjo, M. M. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Tarmizi (ed.); Pertama). PT Bumi Aksara.
- Utaminingsih, A. (2020). *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis*
- Malang: UB Press.
- Zubaedi (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktek*. Jakarta : Kencana.